

PERAN NEGARA DALAM PELAYANAN INVESTASI ASING DI KOTA BATAM TAHUN 2017

Oleh: Yunia Claudia

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M. Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The role of the State through Batam Indonesia Free Zone Authority (BIFZA) as the Central Government in the are of Batam City in the context of creating an invesment climate and increasing economic growth in Batam, the Riau Island and the national. Batam Indonesia Free Zone Authority (BIFZA) has a strong legal basis and this is stated in Government Regulation Number 46 of 2007 concerning the Free Trade Zone and Batam Free Port. This research uses a qualitative approach. Data was collected using stakeholder elements in Batam Island in 2017. Data were collected through informants purposively. Data collection techniques using field research, interviews and documentation studies. While data analysis uses the process of reducing, presenting and verifying data.

The results of the discussion show that first, the dualism of authority between the Batam Indonesia Free Zone Authority (BIFZA) and the Batam City Government in legal uncertainty in Batam City, where Batam is currently being discouraged as initially a Free Trade Zone (FTZ) or Free Trade Zone towards a Special Economic Zone (KEK) . This causes doubts about the investors who will invest their capital in Batam. So this will have an impact on economic growth both in Batam City, Riau Islands and National. Secondly, the role of the State through the Batam Business Entity in managing the increase of foreign investment in the City of Batam in 2017. In this case the Batam Indonesia Free Zone Authority in creating a good investment climate so as to realize economic growth in the city of Batam.

Keywords: *Dualism of Authority, Foreign Investment, Batam City*

A. Pendahuluan

Badan Pengusahaan (BP) Batam merupakan bentuk Badan Layanan Umum, BP Batam memiliki tugas khusus menjamin kepastian investasi. BP Batam berperan membentuk Kota Batam sebagai pusat perdagangan, logistik, dan wisata. Wewenangnya

mencakup urusan pertanahan, pengelolaan infrastruktur, dan pelayanan investasi, termasuk penerbitan izin keluar-masuk barang.

Secara historis pengelolaan Pulau Batam dilakukan oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN

Pertamina) (1970-1971); Badan Pimpinan (1971-1973); Otorita Batam (1973-2007); serta terakhir Badan Pengusahaan Batam (2007-sekarang).¹ Kota Batam dijadikan Singapura-nya Indonesia sesuai Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Dengan ditetapkannya Batam sebagai daerah industri yang berstandar Internasional maka lingkungan kerja daerah industri tersebut di dukung oleh Otorita Batam sebagai penggerak Pembangunan Batam.

Pada Era Reformasi, dengan terbitnya UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, maka Kotamadya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi. Tahun tersebut merupakan titik balik bagi kedudukan hubungan Pemko Batam dan BP Batam. Pemko Batam yang menjadi penyelenggara dan BP Batam “hanya” diikutsertakan.

Kemudian pada 2007, Batam ditetapkan menjadi Kawasan Khusus atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Otorita Batam berubah menjadi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Dimana BP Batam menjadi penyelenggara fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, dan

¹ Muhammad Sapta Murti. 2014. *Urgensi Otonomi Khusus Batam dikaitkan dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Rechtsvinding; Media Pembinaan Hukum Nasional/ Vol. 3 No. 2, Agustus 2014

Pemko Batam “hanya” menjalankan fungsi lainnya di luar fungsi khusus.²

Status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) FTZ Batam ini terus menambah fasilitas dan kemudahan di Kawasan FTZ Batam. Diantaranya memberlakukan tata niaga sesuai dengan status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Karakteristik FTZ seharusnya mempermudah kegiatan ekspor-impor. Segala peraturan dari pemerintah pusat yang dianggap kurang efisien diupayakan untuk segera diambil alih atau dilimpahkan ke BP Batam.³

Pengusaha kawasan industri menuntut adanya kepastian hukum, sebab dengan kepastian hukum yang jelas akan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di dalam negeri. Pemerintah harus bisa menjaga dan mempertahankan investor yang sudah ada saat ini untuk tetap mengembangkan usahanya.⁴

Batam masih menjadi tujuan investasi menarik bagi para investor Singapura. Batam memiliki kelebihan sendiri, Singapura juga memiliki kekuatannya sendiri, dan apabila dua kekuatan ini dikolaborasikan akan dapat

² Kawan BP Batam. 2016. *Mendudukan Kewenangan Pengelolaan Batam Pasca UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.

³ Rifki Setiawan Lubis. 2018, 9 Januari. “Perkuat Fasilitas FTZ: BP Batam Upayakan Penerapan FTA”. *Batam Pos*. Hal 1-2.

⁴ Rifki Setiawan Lubis. 2017, 14 Desember. Pengusaha Minta Jaminan Keamanan dan Kepastian Hukum; Yakin Ekonomi Membaik. *Batam Pos*. Hal 1-2.

menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Batam memiliki potensi yang sangat besar karena lokasinya secara geografis sangat strategis dan memiliki berbagai fasilitas yang menarik bagi investor. Potensi ini akan menjadi kenyataan bila ditunjang dengan sejumlah reformasi kebijakan dari pemerintah pusat dan perubahan sistem yang dilakukan BP Batam. Masalah Batam saat ini sedang terjadi ketidakpastian hukum, terjadi dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.⁵

Tabel 1
Realisasi Investasi Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

No	Tahun	Proyek	Investasi (US\$ Ribu)
1.	2014	54	152.233,6
2.	2015	197	125.116,5
3.	2016	369	256.955,8
4.	2017	192	30.553,6

Sumber: Development Progress of Batam, 2017

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2014-2016 terjadi peningkatan yang signifikan dan pada tahun 2017 terjadinya penurunan realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dalam hal ini realisasi investasi asing di Kota Batam.

⁵ Nurlis E. Meuko. 2017, 5 Juni. *Secara Ekologi Investasi Batam Masih Menggoda, Mengapa Investor Kurang Terpikat?.* Diakses dari <https://www.batamnews.co.id/berita-23420-secara-ekologi-investasi-batam-masih-menggoda-mengapa-investor-kurang-terpikat.html#>

Dengan adanya realisasi investasi asing di Kota Batam secara langsung juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dimana pada tahun 2017 Kota Batam menduduki pada 2,4% capaian terendah sepanjang sejarah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam.

Tabel 2
Tenaga Kerja di Kota Batam

No.	Tahun	Tenaga Kerja
1.	2014	999
2.	2015	2.347
3.	2016	2.337
4.	2017	2.162

Sumber: Development Progress of Batam, 2017

Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara tahun 2014 hingga 2017 terkait tenaga kerja di Kota Batam pada tahun 2014 dengan jumlah tenaga kerja 999 orang dan mengalami lonjakan dengan angka yang signifikan di tahun 2015. Tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan angka terhadap tenaga kerja yang tidak terlalu signifikan.

Tabel 3
Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing di Batam Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2013-2017

No	Tahun	Jutaan US\$
1.	2013	285.93
2.	2014	285.18
3.	2015	474.06
4.	2016	392.19
5.	2017 (s.d Juni 2017)	57.39

Sumber: Development Progress of Batam, 2017

Tabel di atas menunjukkan perbandingan antara tahun 2013 hingga juni 2017 terkait Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing di Batam. Pada tahun 2013 - 2014 terjadi penurunan. Tahun 2014 -2015 terjadi kenaikan yang signifikan. Tahun 2015-2016 terjadi penurunan. Tahun 2016 ke Juni 2017 terjadi penurunan yang signifikan.

Tabel 4

Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2013-2017

No.	Tahun	Miliar Rupiah
1.	2013	75.67
2.	2014	20.61
3.	2015	34.70
4.	2016	267.84
5.	2017 (s.d Juni 2017)	253.51

Sumber: Development Progress of Batam, 2017

Tabel di atas menunjukkan perbandingan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Kota Batam Tahun 2013-Juni 2017. Pada Tahun 2013-2014 terjadi penurunan. Tahun 2014-2015 terjadi kenaikan. Pada tahun 2015-Juni 2017 terjadi kenaikan yang signifikan.

Berdasarkan fenomena di atas, dalam penelitian mengenai Peran Negara dalam Pelayanan Investasi Asing di Kota Batam Tahun 2017. Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peran

Negara melalui Badan Pengusahaan Batam dalam Pelayanan Investasi Asing di Kota Batam Tahun 2017 dan Mengapa adanya dualisme kewenangan dalam Pelayanan Investasi Asing di Kota Batam Tahun 2017.

B. Kerangka Teoritis

Peran Negara

Robert Glipin dalam *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order* mencoba mengurai peran negara dalam tatanan baru ekonomi global dengan menawarkan pembahasan mengenai globalisasi ekonomi dunia dan implikasinya terhadap ekonomi politik internasional. Pada pertengahan dekade 1980-an, sebuah revolusi dalam ekonomi internasional terjadi saat perusahaan multinasional (MNC), penanaman modal asing secara langsung (FDI), dan intensitas perdagangan dunia yang semakin masif telah mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perkembangan ekonomi dunia. Glipin percaya bahwa negara bangsa (*nation-state*) tetap merupakan aktor yang dominan baik dalam ekonomi domestik maupun ekonomi internasional karena berjalannya perkembangan perekonomian dunia ditentukan baik oleh pasar dan kebijakan negara bangsa.⁶

Susan Strange dalam *States and Market* menegaskan kembali hadirnya politik dalam proses-proses ekonomi. Strange juga menawarkan pembahasan mengenai kekuatan-

⁶ Budi Winarno. 2009. *Pertarungan Negara vs Pasar*. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal. 63-64

kekuatan yang dapat dimaksimalkan negara dalam ekonomi politik internasional. Ekonomi berbicara mengenai penggunaan sesuatu yang langka untuk keinginan yang tidak terbatas. Sedangkan politik berbicara mengenai bagaimana menciptakan keteraturan (*order*) dan menyediakan barang-barang untuk publik. Kajian antara ekonomi dan politik inilah yang melahirkan sistem ekonomi politik.⁷

Strange menekankan bahwa *power* menentukan keterkaitan antara otoritas dengan pasar. Pasar tidak akan memainkan peran yang dominan dalam kondisi di mana fungsi ekonomi politik dijalankan oleh orang yang memiliki *power* dan otoritas. Perbedaan dalam pengelolaan sistem ekonomi yang bertumpu pada sektor swasta, atau ingin di ubah menjadi berorientasi pasar, atau ketika ingin dikembalikan menjadi berpusat kepada negara kesemuanya bertumpu pada banyak sedikitnya otoritas pengendali pasar itu sendiri.

Dalam pembahasan mengenai *power* terdapat dua jenis kekuasaan yang ada dalam ekonomi politik. *Pertama*, kekuasaan struktural dan yang *kedua* adalah kekuasaan relasional. Kekuasaan struktural adalah kekuasaan yang membentuk dan menentukan struktur ekonomi politik global dimana semua aktornya seperti; negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan para pemegang kapital internasional berkerja di dalam sistem tersebut.⁸

Dalam konteks pembangunan ekonomi dewasa ini maka peran negara dapat dikatakan sebagai “*capitalist development state*” yang berperan dalam menjaga agar kebebasan pasar dan tingkat integrasi ekonomi nasional dengan ekonomi internasional bersifat relatif, disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tempat tertentu. Sebagai suatu paradigma baru, yang menempatkan paradigma *state-led development* dan *market driven development* dalam posisi yang saling melengkapi, paradigma *capitalist bureaucracy*, yaitu suatu birokrasi yang mempunyai ethos *enterpreneurial* tertentu, seperti kebijakan untuk mendapatkan keuntungan, dorongan untuk selalu mencari perubahan dan mengeksploitasi perubahan dan menjadikannya sebagai peluang.⁹

Paradigma *capitalist development state* membutuhkan negara yang mempunyai kapabilitas dan mampu berperan secara efektif. *Pertama*, mengimbangi peran negara dengan kapabilitasnya. Sebuah negara yang mempunyai kapabilitas yang besar akan mampu bertindak secara efektif, sedangkan negara yang mempunyai kapabilitas yang kecil akan cenderung bertindak kurang efektif. Kapabilitas adalah kemampuan negara untuk melakukan dan mempromosikan tindakan-tindakan kolektif secara efisien, seperti hukum dan tata tertib, kesehatan umum dan infrastruktur dasar.

Kedua, meningkatkan kapabilitas negara dengan menyegarkan kembali (*reinvigorating*) lembaga-lembaga

⁷ *Ibid.* Hal. 66-67

⁸ *Ibid.* Hal. 68

⁹ *Ibid.* Hal. 140

publik. Ini berarti bahwa negara harus melakukan perencanaan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang efektif dan sekaligus menyingkirkan hambatan-hambatan maupun mengoreksi tindakan-tindakan negara yang sewenang-wenang dan memberantas korupsi yang sudah mengakar. Dengan demikian, lembaga-lembaga harus mempunyai daya saing yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensinya. Ini memberikan makna mengingatkan kinerja lembaga-lembaga negara, memperbaiki upah dan insentif.¹⁰

Pemerintah setidaknya mempunyai beberapa keuntungan dalam intervensinya untuk melakukan koreksi terhadap pasar, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuatan memberlakukan pajak. Pemerintah dapat memberlakukan pajak terhadap *polluter* atau mereka yang menyukai kebiasaan merokok sehingga eksternalitas lingkungan bisa diperkecil.
2. Kekuatan untuk mengatur. Pemerintah dapat membuat aturan yang melarang suatu kegiatan tertentu karena, misalnya kegiatan ekonomi tersebut sudah dikelola secara efisien oleh usaha-usaha kecil.
3. Kekuasaan untuk menegakkan hukum. Dengan kekuatan untuk membuat hukum, maka pemerintah dapat memberlakukan hukum yang berkonsekuensi terhadap tindakan hukum.

Kedaulatan suatu negara adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Hal ini tercermin pada banyak masalah dimana negara dengan

segala perangkatnya berkewajiban penuh untuk melindungi dan menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi jalannya pemerintahan dan kenyamanan rakyat yang menempati negara tersebut.¹¹

Ekonomi Politik Modern

Penulis menggunakan Teori Ekonomi Politik Modern oleh Jeffry A. Frieden yang menyebutkan bahwa *Political Economy Modern* mempunyai empat bagian komponen: Penentuan aktor dan tujuan mereka, mespesifikasikan kebijakan aktor tersebut, menentukan bagaimana mereka membentuk sebuah institusi dan bagaimana interaksi mereka dengan institusi sosial lainnya. Teori ini melihat bagaimana kebijakan dibentuk oleh keadaan sosio-ekonomi yang ada di lapangan yang kemudian organisasi (instansi pemerintah) mencoba untuk memenuhi kepentingan sesuai keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Peran masing-masing aktor dalam membuat sebuah kebijakan sangat ditentukan dari kemampuan aktor tersebut dalam merumuskan, melaksanakan, dan mempertimbangkan konsekuensi kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar juga tergantung dari kemampuan masing-masing aktor dalam mempengaruhi dan memanfaatkan sumber daya ekonomi dan politik yang dimilikinya. Seperti yang diungkapkan oleh Jeffry A. Frieden di dalam bukunya yang berjudul *"The Method Analysis: Modern Political Economy"* tentang "actor

¹⁰ *Ibid.* Hal. 140-141

¹¹ Irham Fahmi. 2010. *Pengantar Politik Ekonomi*. Bandung: Alfabeta. Hal. 52

group”, aktor dapat diidentifikasi ke dalam beberapa analisis pertanyaan yaitu:

Suatu negara karena menghadapi persoalan ekonomi yang kurang menguntungkan dan parah, maka sering negara tersebut akan menitikberatkan perbaikan ekonominya dengan mengenalkan model pembangunan pertumbuhan yang berdasarkan indikator ekonomi. Disini kelihatan bahwa suatu negara yang menerapkan model pembangunan pertumbuhan ekonomi, dimungkinkan karena keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang cukup parah dengan jalan membawa masyarakatnya cepat atau lambat menjadi masyarakat industri.

Harus juga diakui bahwa pertumbuhan ekonomi bagaimanapun juga mempunyai peran yang penting dalam meningkatkan taraf hidup rakyat, agar terbebas dari kemiskinan. Kendati pertumbuhan ekonomi dapat memperbaiki keadaan, tetapi belumlah sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Dari pengalaman beberapa negara dunia ketiga, justru pertumbuhan ekonomi kadang-kadang mempunyai indikasi yang kurang menguntungkan. Sebuah studi menunjukkan bahwa di beberapa negara yang mengaplikasikan model pertumbuhan, si miskin justru makin buruk keadaannya dibandingkan pada masa awal pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakadilan justru semakin meningkat tatkala kesejahteraan si miskin mulai membaik. Artinya disini terdapat kesenjangan antara si kaya dan si miskin, dan keadilan adalah suatu barang langka yang sukar ditemui.

Dalam perjalannya, ternyata model pertumbuhan itu tidaklah menjamin terbebasnya rakyat dari kemiskinan dan kebodohan. Banyak para pakar dan negarawan yang juga tidak puas, karena pada kenyataannya tidak menyelesaikan sepenuhnya masalah-masalah pembangunan seperti; perbaikan tingkat hidup sebagian besar rakyat lapisan terbawah. Beberapa kebutuhan pokok yang sangat vital bagi kelangsungan hidup rakyat, ternyata tidaklah terpenuhi, karena *trickle down effect* yang diharapkan tidak kunjung mengalir. Itulah sebabnya dalam perkembangan kemudian muncul kritik terhadap model pertumbuhan yang menekankan pada indikator ekonomi murni, kritik-kritik tersebut akhirnya menawarkan indikator lain, yang pada gilirannya memunculkan model pembangunan lainnya. Disinilah kita akan bertemi dengan apa yang disebut dengan paradigma pembangunan *basic need*, yang lebih menekankan bahwa indikator sosial. Bagian berikut ini akan membicarakan model tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Badan Pengusahaan Batam dalam Pelayanan Investasi Asing di Kota Batam Tahun 2017

Negara berusaha menciptakan lingkungan dimana industri dapat menciptakan keunggulan yang dapat mengatasi gangguan yang disebabkan oleh alam (cuaca, sumber daya alam) atau manusia (regulasi, tekanan populasi). Bagi suatu negara, hal ini berarti bahwa dalam proses pembangunan seharusnya ada

perusahaan dan industri di suatu negara yang terus-menerus memperluas produksi dan ekspornya.¹²

Tabel 5

Peran Negara Melalui Badan Pengusahaan Batam dalam Pelayanan Investasi Asing di Kota Batam

Aktor	Tujuan	Tindakan
Badan Pengusahaan Batam	Melaksanakan program dari Pemerintah Pusat	Pelayanan perizinan hulu
Pemerintah Kota Batam	Mengembangkan sebagai kawasan investasi	Pelayanan investasi hilir
Kamar Dagang dan Industri Kota Batam	Sebagai wadah dunia usaha baik di Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Berkolaborasi dengan Badan Pengusahaan Batam (PMA) dan Pemerintah Kota Batam (PMDN)
Himpunan Kawasan Industri Kepulauan Riau	Pengelola kawasan industri	Berkolaborasi dengan Badan Pengusahaan Batam (PMA: Industri)

Sumber Data: Olahan Peneliti, 2019

Melalui Peran Badan Pengusahaan Batam dalam

¹² Anindita, Ratya dan Michael R. Reed. 2008. *Bisnis dan Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: CV. Andi Offset Hal. 158

pelayanan investasi asing diharapkan dapat melayani calon investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Batam.

2. Peran Badan Pengusahaan Batam antar Aktor Instansi Pemerintah Terkait

Untuk mengidentifikasi para aktor serta tindakan apa saja yang sudah dilaksanakan dalam pelayanan investasi asing di Kota Batam ini adalah Badan Pengusahaan (BP) Batam, Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Ketua Dewan Pakar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepulauan Riau.

Tabel 6

Aktor dalam Mengelola Pelayanan Investasi Asing di Kota Batam

No	Variabel	Pihak	Kompetensi
1	Aktor dan Tujuan	Badan Pengusahaan Batam	Wewenang pelayanan perizinan investasi asing di Kota Batam (Pemerintah Pusat)
		Pemerintah Kota Batam	Wewenang pelayanan perizinan investasi asing di Kota Batam (Pemerintah Daerah)
2	Kebijakan Aktor	Badan Pengusahaan Batam	Wewenang perizinan investasi asing di Kota Batam (izin prinsip)
		Pemerintah Kota Batam	Wewenang perizinan

			investasi asing di Kota Batam (izin usaha)
3	Agregasi Aktor dalam Kelompok	Badan Pengusahaan Batam	Wewenang melaksanakan pelayanan investasi asing di Kota Batam
4	Kelompok dan Hubungan Mereka dengan Lembaga Sosial Lainnya	Badan Pengusahaan Batam	Pemerintah Pusat
		Pemerintah Kota Batam	Pemerintah Daerah
		Kamar Dagang dan Industri Kota Batam	Wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian
		Himpunan Kawasan dan Industri Kepulauan Riau	Himpunan pengelola kawasan industri

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

3. Program Izin Investasi 3 Jam dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK)

Pelaksanaan suatu kebijakan seperti Program Izin Investasi 3 Jam (I23J) dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK) tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya peran serta aktor di dalamnya. Aktor-aktor tersebut dapat berupa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta, Investor peran masing-masing aktor ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi yang dimiliki. Dari tugas dan fungsi tersebut maka akan lahir aktifitas politik yang nantinya akan mengarah pada kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing aktor.

Badan Pengusahaan Batam meluncurkan layanan Izin Investasi 3

Jam (I23J) dan Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KILK). Melalui layanan ini, BP Batam menjamin akan memberikan daya tarik bagi investor yang memiliki investasi minimal Rp 50 miliar atau menyerap tenaga kerja minimal 300 orang, sehingga bisa meringkas proses perizinan investasi hanya dalam waktu tiga jam.

Ada delapan perizinan melalui layanan I23J dan KILK. Antara lain:

- a. Izin Investasi;
- b. Akta Perusahaan dan Pengesahan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- f. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
- g. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); dan
- h. Nomor Induk Kependudukan (NIK).

KILK merupakan program BP Batam untuk mempercepat pembangunan pabrik investor yang selama ini banyak pengusaha mengeluhkan lambatnya kelaur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL). Program ini bersifat paralel dengan perizinan lainnya. Khusus lokasi-lokasi industri yang diajukan oleh BP Batam dapat dibangun melalui KILK yang sampai saat ini masih di tangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tabel 7

Investor Asing melalui Pelayanan Perizinan BP Batam I23J

Nama Perusahaan	Asal	Bidang	Nilai Investasi (USD)
PT. Ling Easy Batam	Singapura	Depot Minyak	80 Juta
PT. Enerco RPO Internasional	Batam	Spesialisasi Minyak dan Gas Industri	90 Juta
PT. Balckmagic Design Manufaktur	Australia	Memproduksi Peralatan Film dan Broadcast	4 Juta
PT. Esun Internasional Utama Indonesia	Singapura	Mendaur Ulang Logam dan Non Logam	4 Juta
PT. Infocus Consumer International Indonesia	Perusahaan Patungan Singapura dan China	Memproduksi Peralatan Komunikasi Nirkabel	4 Juta
PT. Indo Kreasi Grafika	Malaysia	Industri Kemasan Kotak dari Kertas dan Karton	3,8 Juta
PT. Asus Technology Indonesia Batam	Taiwan	Elektronik	9 Juta
PT. Shin Preform Plastick	Taiwan	Barang Plastik	4,5 Juta

PT. Mes Machine ry Indonesia	Jepang	Membuat Crame	4 Juta
PT. Mitech Arensis Internasional	Patungan Puerte Rico dan Indonesia	Memproduksi Mesin Listrik	10 juta.
PT. Magnum Teknologi Indonesia	Patungan China dan Indonesia	Memproduksi Sepeda Motor Listrik	4 juta

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

4. Dualisme Kewenangan dalam Pelayanan Investasi Asing di Kota Batam Tahun 2017

Bentuk kewenangan Kota Batam, sejak pertama kali pengembangan Batam hingga sekarang:

1. Tahun 1971-1983 : Era Pemerintahan Tunggal Otorita Batam;
2. Tahun 1983-1999 : Era Dualisme Pemerintahan, yaitu Otorita Batam dan Pemerintah Kota Administratif; dan
3. Tahun 1999 – sekarang : Era Dualisme Pemerintahan Otorita Batam yang sekarang menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Tabel 8
Perizinan yang memiliki kesamaan namun dilakukan oleh dua lembaga

No	Bidang	Perizinan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam	Perizinan yang dimiliki oleh Badan Pengusahaan Batam
1.	Penggunaan lahan dan bangunan	Izin Mendirikan Bangunan	Fatwa Planologi dan Pematangan Lahan
		Dilakukan Oleh Dinas Tata Kelola Kota Batam	Dilakukan Oleh Direktorat Pengelolaa n Lahan Badan Pengusahaan Batam
2.	Reklame	Perizinan Pendirian dan Pemasangan Reklame	Izin Titik Konstruksi Reklame
		Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah	Dilakukan Oleh Direktorat Investasi dan Marketing Badan Pengusahaan Batam
3.	Perdagangan	Izin Usaha	Registrasi Perusahaan dan Pemberian Izin Usaha
		Dilakukan Oleh Badan Penanaman Modal Kota Batam	Dilakukan Oleh Direktorat Investasi dan Marketing Badan Pengusahaan

			n Batam
4.	Perdagangan	Surat Izin Perdagangan	Surat Izin Perdagangan
		Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kota Batam	Dilakukan Oleh Direktorat Investasi dan Marketing Badan Pengusahaan Batam
5.	Perdagangan	Tanda Daftar Perusahaan	Tanda Datar Perusahaan
		Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kota Batam	Dilakukan Oleh Direktorat Investasi dan Marketing Badan Pengusahaan Batam
6.	Perdagangan	Tanda Daftar Barang	Tanda Daftar Gudang
		Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kota Batam	Dilakukan Oleh Direktorat Investasi dan Marketing Badan Pengusahaan Batam

Sumber: Muhammad Zaenuddin, 2017

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam hal ini sudah melaksanakan program Pemerintah Pusat untuk percepatan pelayanan

berusaha sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Meskipun pertumbuhan di akhir 2017 Pertumbuhan Ekonomi Batam sebesar 2,4 %. Dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam, agar mendesak pemerintah pusat agar diterbitnya Peraturan Pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yaitu "... hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ...". jika dengan hadirnya Peraturan Pemerintah tersebut akan jelas pembagian kewenangan sehingga memberikan kepastian hukum kepada investor dan hal ini akan berdampak pada investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Batam. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pertumbuhan ekonomi Kota Batam segera pulih kembali.

2. Saran

- a. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam hal ini sudah melaksanakan program Pemerintah Pusat untuk percepatan pelayanan berusaha sudah dilaksanakan semaksimal mungkin. Meskipun pertumbuhan di akhir 2017 Pertumbuhan Ekonomi Batam sebesar 2,4 %.
- b. Dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam, agar mendesak pemerintah pusat agar diterbitnya Peraturan Pemerintah sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yaitu "... hubungan

kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ...". jika dengan hadirnya Peraturan Pemerintah tersebut akan jelas pembagian kewenangan sehingga memberikan kepastian hukum kepada investor dan hal ini akan berdampak pada investor yang akan menanamkan modalnya di Kota Batam. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pertumbuhan ekonomi Kota Batam segera pulih kembali.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan akan lebih memberi kontribusi yang lebih baik lagi dari penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Albintani, Muchid. 2016. *Berburu Rente di Pulau Batam Provinsi Istimewa Singapura dan "Negara Bintang"*. Yogyakarta: Deepublish
- Anwar, Khairul. 1999. *Bahan Ajar Teori Pembangunan: Peran Negara dalam Pembangunan*. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau
- Caporaso, James A. dan David P. Levine. 2015. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Cresswell, John W. 2010. *"Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed"*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Fahmi, Irham. 2010. *Pengantar Politik Ekonomi*. Bandung: Alfabeta
- Maharadja, Apul D. 2003. *Membangun Indonesia: Studi Kasus Batam*. Jakarta: Surya Multi Grafika
- Mas'ood, Mochtar. 2003. *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muliono, Heri. 2001. *Merajut Batam Masa Depan*. Jakarta: Pusataka LP3ES
- Rachbini, Didik J. 2002. *Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soegeng, Sarjadi. 2001. *Otonomi: Potensi Masa Depan Republik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Usman, Husaini dan Prunomo Setiady Akbar. 2014. *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2009. *Pertarungan Negara vs Pasar*. Yogyakarta: Med Press
- Jurnal Online:**
- Dalla, Alexander Yanuard dan Friska Natlia Hutabarat. *Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam*. (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Jurnal Matra Pembaruan Vol. 02 No. 02, Juli 2018) diakses dari (jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/493)
- Murti, Muhammad Sapta. *Urgensi Otonomi Khusus Batam Dikaitkan dengan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean 2015*. (Media Pembinaan Hukum Nasional, Jurnal Rechts Vinding Vol. 03 No. 02, Agustus 2014)
- Zaenuddin, Muhammad, et all. *Dualisme Kelembagaan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam*. (Batam: Journal of Business Administration, Vol. 01, No. 02, September 2017) diakses dari (<https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JABA/article/view/613>)
- Peraturan:**
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

1973 tentang daerah Industri Pulau Batam

Publikasi Pemerintah:

Badan Pengusahaan Batam. 2017. *Development Progress of Batam Tahun 2017*. Edisi I Volume XXXI

Publikasi Pemerintah Online:

Badan Pengusahaan Batam. Batam: Penulis. Diakses dari (https://bpbatam.go.id/ini/ind_ex.jsp)

Badan Pengusahaan Batam. 2017. *Development Progress of Batam Tahun 2017*. Edisi II Volume XXXII diakses dari (http://datin.bpbatam.go.id/w_p-content/uploads/2018/07/Dev_Prog_of_Batam_2017_p.pdf)

Pemerintah Kota Batam. Batam: Penulis. Diakses dari (<https://batam.go.id/>)

Skripsi:

Siregar. Achyar Hanif. 2018. Skripsi Sarjana: *Perubahan Tarif Uang Wajib Tahunan Badan Pengusahaan Batam Tahun 2016: Tinjauan Ekonomi Politik*. (Universitas Riau: Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan, 2018)

Surat Kabar:

Rifki Setiawan Lubis. 2017, 9 Desember. *Yakin Batam Lebih Baik: Pengusaha Optimistis Ekonomi 2018 Tumbuh 5%*. Batam Pos

Rifki Setiawan Lubis. 2017, 14 Desember. *Pengusaha Minta Jaminan Keamanan dan Kepastian Hukum; Yakin Ekonomi Membaik*. Batam Pos

Rifki Setiawan Lubis. 2017, 30 Desember. *“Investasi di Batam Naik 136%: BP Batam Janjikan Tambahan Insentif bagi Investor”*. Batam Pos

Surat Kabar Online:

Giri Hartomo. 2017, 27 Juli. *Rayakan 50 Tahun Kerjasama, Kadin Ajak Singapura Investasi di Indonesia*. Diakses dari (<https://economy.okezone.com/read/2017/07/27/320/1745290/rayakan-50-tahun-kerjasama-kadin-ajak-singapura-investasi-di-indonesia>)

Leo. 2017, 1 November. *BP Batam Akomodir Keluhan Pengusaha*. Diakses dari (<https://batampos.co.id/2017/11/01/bp-batam-akomodir-keluhan-pengusaha/>)

Saifullah Ismail. 2017, 29 Juli. *Indonesia dan Singapura Resmi Bentuk Dewan Bisnis Indonesia - Singapura*. Diakses dari (<https://www.matamatapolitik.com/indonesia-dan-singapura-resmi-bentuk-dewan-bisnis-indonesia-singapura/>)

Wie. 2017, 18 Mei. *Atasi Dualisme Kewenangan Pemko dan BP*

*Batam, Ini yang Pertama
Dilakukan Pemerintah.*
Diakses dari
(<http://batam.tribunnews.com/2017/05/18/atasi-dualisme-kewenangan-pemko-dan-bp-batam-ini-yang-pertama-dilakukan-pemerintah>)